

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan secara etimologis berasal dari istilah *power*, yang berarti kekuatan atau kapabilitas. Pemberdayaan ialah kekuatan dari mereka yang memiliki kekuasaan atas orang-orang yang tidak berdaya atau belum diberdayakan.¹ Seperti menurut Karls sebagaimana dikutip Syafi'i Ma'arif yang berpendapat bahwa pemberdayaan perempuan ialah pengambilan keputusan dan tindakan *transformatif* yang mengarah pada kekuasaan, pengawasan, dan realisasi proses memperoleh kemampuan dengan kesamaan posisi yang lebih tinggi antara perempuan dengan laki-laki.² Sementara itu, Prijono, S. Onny dan Pranaka memiliki persepsi, pemberdayaan merupakan suatu bentuk dorongan untuk memotivasi seseorang untuk memiliki kemampuan atau keberdayaan dalam suatu keputusan pilihan hidup dan pemberdayaan harus ditujukan kepada kelompok dan masyarakat yang terpinggirkan.³

Pengertian pemberdayaan tersebut pada dasarnya, pemberdayaan bertujuan untuk mengembangkan potensi yang terdapat pada diri individu dan kelompok masyarakat. Untuk proses pemberdayaan terdiri dari serangkaian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan atau pemberdayaan masyarakat yang paling rentan, terutama mereka yang menderita kemiskinan. Tujuan dari keberdayaan mengacu melalui kondisi atau pencapaian pada perubahan sosial. Artinya, orang yang di berdayakan atau mempunyai potensi dan kemampuan dalam pemenuhan kondisi fisik, ekonomi dan sosial seperti memiliki kepercayaan diri, ikut andil dalam kegiatan sosial dan mandiri guna memenuhi kebutuhan kehidupannya.⁴

Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses penyadaran dan pengembangan kapasitas untuk peningkatan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dengan tujuan agar perempuan dapat memberikan kontribusi yang berarti. Perempuan yang mencari nafkah

¹ Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gaya Media, 2004), 7.

² Syafi'i Maarif, *Pembangunan dalam Perspektif Gender* (Malang: UMM Press, 2013), 189.

³ Prijono, S. Onny dan Pranaka, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta: CSIS, 1996), 55.

⁴ Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, 7.

dan terlibat dalam kegiatan ekonomi cenderung lebih mandiri. Pendapatan sangat penting bagi perempuan untuk memiliki kekuatan negosiasi dalam semua pengambilan keputusan di dalam dan di luar rumah, terutama yang memengaruhi nasib perempuan.⁵

Konsep pemberdayaan perempuan bisa jadi sulit bagi satu orang tanpa potensi dan kekuatan dari komunitas itu sendiri, untuk membantu membuat proses perubahan lebih cepat dan lebih terarah. Perlunya kekuatan yang membuat perubahan dalam kelompok, organisasi, atau komunitas. Faktor pendorong dalam masyarakat harus ditetapkan sejak awal transformasi dan harus dipertahankan sepanjang masa.⁶

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pelaku pemberdayaan harus berpegang pada prinsip-prinsip pemberdayaan. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai panduan untuk pemberdayaan, memastikan bahwa hal itu dilakukan dengan tepat.⁷ Dengan demikian, pemberdayaan diarahkan tepat pada tujuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup yang terkait dengan pemberdayaan, pengembangan potensi, dan kemandirian. Secara teori, pemberdayaan pegawai perempuan didasarkan pada tiga pengertian, yaitu:

1. *Capacity Building*, yaitu dengan pengembangan kapasitas perempuan
2. *Cultural Change* yaitu istilah yang mengacu pada perkembangan budaya yang menguntungkan perempuan
3. *Structural Adjustment* merupakan penyesuaian struktural yang menguntungkan perempuan.

Menurut definisi di atas, pemberdayaan adalah proses memperoleh kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan dari mereka yang berkuasa, atau memberikan kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada mereka yang berkuasa. Pemberdayaan yang disinggung dalam penelitian ini adalah pemberdayaan perempuan oleh masyarakat kecamatan Mayong melalui kegiatan SPP.

Secara umum pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi khususnya di pedesaan, menghadapi kendala karena rendahnya pendidikan, kurangnya keterampilan, kurangnya prospek kerja, dan juga hambatan ideologis yang berkaitan dengan rumah tangga. Selain itu, perempuan menghadapi kendala tertentu, karena mereka harus

⁵ Arief Budiman, *Pergeseran Peran Laki-Laki dalam Rumah Tangga: Suatu Tujuan Sosiologis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 43.

⁶ Setiana Lucie, *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 6.

⁷ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta 2013), 60.

melakukan fungsi reproduksi, produksi, dan sosial secara bersamaan di masyarakat.⁸ Hal ini sangat membatasi kemampuan perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada. Oleh karena itu, prakarsa pemberdayaan ekonomi bagi perempuan menjadi sangat penting, karena perempuan memiliki potensi yang luar biasa dalam perekonomian, khususnya di bidang pengangguran rumah tangga.

Proyek-proyek pemberdayaan perempuan harus dilaksanakan secara bersamaan, terus-menerus, dan dengan partisipasi semua lapisan masyarakat. Upaya pemberdayaan perempuan juga harus dilaksanakan secara konkrit, tidak hanya sebagai basa-basi yang berakhir pada tataran wacana.⁹ Oleh karena itu, dikembangkan program pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan perempuan untuk terlibat secara aktif dalam inisiatif pembangunan daripada membiarkan mereka menjadi target pembangunan, seperti yang terjadi dalam program ini.
2. Mengembangkan potensi kepemimpinan perempuan guna meningkatkan daya tawar serta berpartisipasi dalam proyek-proyek pembangunan sebagai perencana, pelaksana, dan memantau dan mengevaluasi kegiatan.
3. Memperkuat sumberdaya manusia dan kemampuan perempuan dalam berorganisasi di tingkat lokal sebagai komunitas untuk mendorong perempuan berpartisipasi aktif dalam program pengembangan masyarakat.¹⁰

Pemberdayaan perempuan perdesaan, meliputi pertimbangan beberapa faktor penting, diantaranya:

1. Peran Pemerintah

Pemerintah merupakan komponen penting dari program peningkatan kesejahteraan rakyat. Masyarakat, baik negara, daerah, maupun pusat memiliki kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apalagi di era otonomi daerah seperti saat ini. Aparat daerah harus bisa menguasai menjadi sistem pembangunan ekonomi dan memberdayakan masyarakat lokal,

⁸ Arief Budiman, *Pergeseran Peran Laki-Laki dalam Rumah Tangga: Suatu Tujuan Sosiologis*, 43.

⁹ Arief Budiman, *Pergeseran Peran Laki-Laki dalam Rumah Tangga: Suatu Tujuan Sosiologis*, 44.

¹⁰ Syafi'i Maarif, *Pembangunan dalam Perspektif Gender*, 164.

karena mereka dapat mengatur dan mengumpulkan uang secara mandiri.¹¹

2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Banyak LSM yang bergerak di bidang sosial berkembang di Indonesia saat ini. LSM adalah Proses pembangunan berkelanjutan yang merupakan kekuatan sosial-politik pada proporsi yang tepat. Adanya LSM dapat menjadikan keselarasan antara otoritas, agen pembangunan (lembaga nasional) berada di jalur yang sama meskipun dengan visi yang berbeda namun dengan tujuan yang sama.¹²

Sekarang ini, banyak LSM yang bergerak di bidang sosial berkembang di Indonesia. LSM telah memainkan banyak peran nyata, terutama dalam membantu perempuan mencapai program pemerintah yang tidak terpengaruh. Melalui swasembada, LSM mengembangkan kegiatan berbasis komunitas dan melaksanakan program yang berbeda setiap wilayah sasaran, tergantung pada kondisi. Akibatnya banyak program negara yang gagal, tidak sama dengan program negara yang sebagian besar yaitu paket-paket dari pusat dan dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, terlepas dari area sarannya. LSM menjadi perantara sumber daya yang tersedia untuk kebutuhan dan pembangunan pedesaan.

3. Pendampingan

Pendampingan di lingkungan kurang mampu membutuhkan pendamping yang bertanggung jawab membantu dalam pembentukan dan pengorganisasian organisasi masyarakat, atau dalam hal ini perempuan. Selain itu, fasilitator harus bekerja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk kualitas anggota dan pengurus kelompok, serta ketajaman bisnis anggota. Karena pasangan yang sempurna datang dari dalam masyarakat.¹³

4. *Local Community Organization*

Persatuan masyarakat yang berkembang secara organik di dalam komunitas adalah cara yang paling efektif untuk memberdayakan komunitas atau perempuan. Perempuan yang

¹¹Isbandi Rukminto, *Intensif Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 56-58.

¹² Isbandi Rukminto, *Intensif Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*,56.

¹³ Isbandi Rukminto, *Intensif Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, 57.

bekerja dengan perempuan lain lebih kuat daripada perempuan yang bekerja sendiri. Kepemimpinan perempuan dalam organisasi masyarakat akan meningkatkan status mereka. Dalam pertemuan-pertemuan, mereka dapat merumuskan apa kebutuhan mereka, sehingga program pemberdayaan dapat lebih mudah mencapai tujuan mereka dengan tujuan bersama.

5. Koperasi

Koperasi merupakan instrumen penting untuk memberdayakan perempuan, terutama dalam hal keterampilan organisasi dan akses keuangan. Kedua hal ini sangat penting bagi perempuan pedesaan. Banyak perempuan pedesaan berpendidikan rendah, dan memiliki ketrampilan pengambilan keputusan, kepemimpinan, kemandirian, dan manajemen yang dapat memberdayakan perempuan serta ekonomi. Tidak hanya bidang ekonomi, tetapi juga psikologis. Di samping itu, koperasi di pedesaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membantu petani dalam mengatur kebutuhan mereka, menampung produk petani untuk dijual melalui cara yang kolektif, dan juga memberikan kemudahan dalam memperoleh pinjaman.¹⁴

6. Peran Swasta

Saat ini, ada beberapa proyek *Corporate Social Responsibility* Perusahaan di Indonesia yang bersifat amal atau diarahkan untuk memberdayakan perempuan di lokasi atau kelompok komunitas tertentu. Sektor swasta diyakini memiliki investasi yang signifikan dalam pemberdayaan perempuan, karena kemandirian dan kurangnya kesetiaan politik. Dengan sumber pendanaan yang cukup besar, sektor swasta dapat memberdayakan perempuan asalkan program yang dilaksanakan memberikan dukungan yang intens dan tingkat keberlanjutan yang tinggi.¹⁵

7. Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan dan mencapai pemerataan dan keadilan. Pendidikan nondiskriminatif tidak hanya menguntungkan perempuan, tetapi juga laki-laki, terutama dengan menyamakan keduanya. Perempuan harus memiliki akses yang adil ke

¹⁴Isbandi Rukminto, *Intensif Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, 57.

¹⁵Isbandi Rukminto, *Intensif Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, 58.

pendidikan untuk melakukan perubahan.¹⁶ Karena pendidikan sangat penting bagi vitalitas masyarakat laki-laki dan perempuan. Pendidikan tidak terbatas pada pendidikan formal; itu juga mencakup pendidikan informal seperti keterampilan (kerajinan tangan, memasak, dll.) dan kapasitas untuk berorganisasi bagi perempuan untuk memberikan atau memperkuat potensi mereka sendiri.

8. Partisipasi

Partisipasi atau kerjasama keterlibatan dalam kaitannya dengan kondisi eksternal. Yang dimaksud dengan asas partisipasi adalah peran aktif dalam proses dimana masyarakat memberikan tenaga, pikiran, atau materi untuk melakukan tahapan pemrograman dan monitoring yang dimulai dengan tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan, untuk memenuhi bentuk materi.

Untuk memberdayakan perempuan di masyarakat, perempuan harus diberitahu tentang kegiatan yang berlangsung. Sekali lagi, keikutsertaan berarti perempuan perlu sadar untuk ikut serta melakukan kegiatan tersebut. Sekali lagi, partisipasi berarti perempuan perlu dilibatkan dalam semua keputusan karena dia akan melakukannya sendiri nanti. Partisipasi berfokus pada bagaimana mereka diberdayakan.¹⁷

B. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

1. Pengertian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

SPP adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh perempuan untuk mengelola dana simpan pinjamnya.¹⁸ Masyarakat miskin produktif yang menginginkan uang untuk operasional wirausaha atau kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam untuk organisasi perempuan yang ada di lingkungan menjadi tujuan dari kegiatan SPP ini. Selain itu, operasional SPP mencakup penyediaan uang pinjaman sebagai modal kerja tambahan bagi kelompok perempuan yang mengelola rekening tabungan dan dana pinjaman. Organisasi berikut berhak menerima uang SPP melalui aktivitas ini:

¹⁶Mansoer Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 10.

¹⁷IsbandiRukminto, *Intensif Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, 58.

¹⁸Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*, 19.

- a. Kelompok terdiri dari wanita yang memiliki hubungan yang sama dan telah saling mengenal setidaknya selama satu tahun.
- b. Menjaga operasional simpan pinjam sesuai dengan pedoman pengelolaan dana simpanan dan pinjaman yang telah disepakati.
- c. Anggota telah menyumbangkan uang dan tabungan sebagai sumber dana pinjaman.
- d. Upaya pinjaman terus produktif.
- e. Mempertahankan struktur dan administrasi grup yang mudah dikelola. Dan dalam hal pengembalian dana, dana tersebut hanya dapat digunakan untuk operasional SPP, baik oleh kelompok lama maupun kelompok baru, sesuai dengan peraturan pengelolaan dana bergulir.

2. Tujuan SPP

Secara umum, kegiatan ini bermaksud untuk memperluas kapasitas operasi simpan pinjam pedesaan, untuk memungkinkan akses ke pembiayaan perusahaan skala mikro, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan sosial dasar, untuk meningkatkan kegiatan kelembagaan perempuan, dan untuk mempromosikan pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.¹⁹ Sementara itu, tujuan khusus dari kegiatan SPP ini adalah untuk mempercepat proses pemenuhan kebutuhan dasar bisnis atau pembiayaan sosial, memberikan kesempatan bagi perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangganya melalui pembiayaan peluang usaha, dan mendorong perempuan untuk memperkuat lembaga simpan pinjam.

3. Ketentuan Dasar SPP

Ketentuan dasar agenda SPP merupakan suatu kemudahan, dimana masyarakat miskin dapat memperoleh bantuan dana pinjaman dengan mudah, cepat dan tanpa syarat agunan. Secara terlembaga yaitu dana kegiatan SPP disalurkan sesuai ketentuan pengelolaannya. Dengan keberdayaan yang didasari proses kegiatannya melalui pertimbangan profesional yang dibuat oleh perempuan, serta pertimbangan dan penciptaan dana bergulir untuk tujuan peningkatan kesejahteraan. Dan pembangunan yang harus diarahkan pada peningkatan pendapatan guna mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi di dalam masyarakat. Selain itu,

¹⁹ Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*, 20.

tanggung jawab dalam pengelolaan uang bergulir yang dapat ditelusuri kembali ke masyarakat.²⁰

4. Pendanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Pembiayaan BLM diberikan oleh PNPM Mandiri Perdesaan untuk operasional bisnis yang terjadi pada tahap perencanaan. Namun, dana untuk kegiatan SPP per kecamatan melebihi 25% dari alokasi BLM. Program SPP dirancang untuk membantu RTM produktif dalam mendanai operasional bisnis dan kebutuhan sosial dasar melalui organisasi SPP berbasis masyarakat.

Bentuk kegiatan SPP ialah penambahan modal kerja kepada kelompok perempuan yang saling mengenal, mengadakan pertemuan rutin dengan kegiatan tertentu dan telah berjalan minimal satu tahun, memiliki aktivitas simpan pinjam, dan memiliki akad kredit. Kemudian mereka sudah memiliki modal anggota dan simpanan untuk sumber biaya kredit bagi anggota, kegiatan kredit kelompok tetap berjalan dengan lancar, dan kegiatan kredit kelompok tertata dengan baik dan mudah dikelola.²¹

5. Mekanisme Pengelolaan

Sistem pengambilan keputusan mengacu pada metode melalui mana kegiatan program SPP dilakukan. Bagian berikut menjelaskan garis yang berbeda dalam fase perencanaan program, termasuk:²²

a. Musyawarah Antar Desa Sosialisasi

MAD sosialisasi adalah pertemuan antar desa yang membahas ketentuan dan persyaratan kegiatan SPP dengan pelaku tingkat desa yang berkumpul di kecamatan untuk sosialisasi proses dan SPP.

b. Musyawarah Desa Sosialisasi

Sosialisasi Musdes adalah proses pembentukan dan penyebaran pengetahuan tentang ketentuan dan persyaratan kegiatan SPP di tingkat desa, agar pemerintah desa memahami dan mempersiapkan tahap selanjutnya.

²⁰ Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*, 19.

²¹ Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*, 21.

²² Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*, 57.

c. Musyawarah Dusun

Musdus merupakan penggalan gagasan untuk menyesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi kelompok RTM untuk dilakukan tawaran menjadi anggota kelompok agar bisa menjadi pemanfaat. Kemudian untuk hasilnya akan dituangkan dalam berita acara.

d. Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MKP)

MKP dilakukan untuk memperdebatkan dan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh organisasi-organisasi perempuan dalam menanggapi kebutuhan masyarakat. Pilihan yang direkomendasikan didasarkan pada pengelompokan yang diusulkan paket proposal desa. Kemudian, menulis proposal untuk kelompok yang diusulkan menggunakan tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang nantinya akan dipresentasikan di tingkat kecamatan.²³

e. Verifikasi

Verifikasi merupakan tahapan kegiatan SPP yang menilai kelayakan suatu kelompok untuk setiap komunitas dengan menggunakan formulir yang tersedia. Mekanisme verifikasi kelompok SPP meliputi penilaian proposal kelompok, yang meliputi informasi tentang pengalaman kelompok dalam kegiatan simpan pinjam, persyaratannya sebagai kelompok, syarat kegiatan simpan pinjam, dan jumlah RTM sebagai calon penerima yang diverifikasi. dengan daftar RTM. Selain itu, prosedur verifikasi ini harus dievaluasi untuk menentukan apakah kelompok tersebut merupakan kelompok pemula, kelompok berkembang, atau kelompok siap, sesuai dengan standar program.²⁴

f. Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan

Langkah ini dimaksudkan untuk membahas dan mengkaji temuan verifikasi. Persyaratan prioritas dibahas selama evaluasi kelompok, dengan calon penerima manfaat diklasifikasikan sebagai RTM. Penilaian yang dilakukan sesuai dengan kelompok usulan desa, sehingga apabila

²³ Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*, 57.

²⁴ Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*, 57.

terdapat kelompok yang tidak lolos dalam verifikasi ini, bukan berarti kelompok tersebut gugur pada paket usulan desa. Namun, uang akan diberikan kepada organisasi sampai kuota BLM terpenuhi.²⁵

Kebutuhan kelompok SPP memprioritaskan masyarakat RTM sebagai anggota dan pemanfaat dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan yang ada pada kelompoknya. BA Tim verifikasi serta pengusul lainnya akan menilai hasil dari penilaian layak atau tidaknya suatu kelompok dengan mengurangi kapasitas RTM dan memperluas opsi komersial mereka.²⁶

g. MAD Penetapan Usulan

Proses ini merupakan pengambilan keputusan untuk menentukan dana usulan pada kelompok-kelompok yang memenuhi kategori untuk diberikan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Prosedur MAD juga dapat dilakukan pada MAD bergulir untuk kecamatan yang menangani keuangan bergulir.

h. Penetapan Persyaratan

Penetapan syarat pinjaman yang tertuang dalam perjanjian pinjaman untuk jangka waktu pinjaman sumber BLM minimal 12 bulan, rencana rencana angsuran BLM penerima dan tingkat kelompok dan tingkat layanan adalah pasar untuk pinjaman dari lembaga keuangan di daerah masing-masing. Pelayanan kredit diputuskan dengan syarat ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga.

i. Pencairan Dana

Dana BLM akan segera dibayarkan secara kelompok per kelompok, dengan ditandatanganinya perjanjian pinjam meminjam antara kelompok dengan UPK. Sementara itu, kepala UPK akan mendanai SPP setelah dikurangi UPK dan operasional desa.²⁷

C. Kesejahteraan

Menurut KBBI, kata “Kesejahteraan” berasal dari kata “Sejahtera” yang berarti keselamatan, kedamaian dan kemakmuran,

²⁵ Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*, 58.

²⁶ Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*, 60.

²⁷ Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*, 61.

ketenteraman, keamanan, dan kegembiraan hidup. Dalam bahasa Sansekerta, kesejahteraan adalah "Cattera" yang artinya "payung", dan dalam konteks ini, kesejahteraan mengacu pada kehidupan tanpa kemiskinan, ketidaktahuan, ketakutan, dan kekhawatiran, serta keberadaan yang aman dan tenteram secara fisik dan emosional.²⁸

Sedangkan pengertian kesejahteraan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 mengenai "kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan yang memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara, menjalani kehidupan yang layak, tumbuh dan mampu melaksanakan tugas sosial". Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kesejahteraan sosial ialah suatu keadaan sejahtera secara keseluruhan baik fisik, mental, dan sosial, bukan hanya perbaikan kekurangan sosial ekonomi tertentu.²⁹

Kesejahteraan sosial melibatkan aspek-aspek yang perlu dicapai secara bertahap. Tahap pertama melibatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau fundamental seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Tahap kedua adalah pengenalan kebutuhan akan akses yang aman, tahap ketiga adalah kebutuhan sosial, tahap keempat kesadaran masyarakat sekitar, dan tahap terakhir adalah terpenuhnya kebutuhan aktualisasi diri.³⁰

1. Tujuan Kesejahteraan

Adi Fahrudin menjelaskan bahwa suatu kesejahteraan bertujuan:³¹

- a. Untuk Menggapai standar hidup dasar seperti konsumsi, perumahan, kesehatan dan hubungan sosial dalam lingkungan yang harmonis.
- b. Untuk mencapai adaptasi sosial dan lingkungan, misalnya dengan menemukan sumber, membangun, dan meningkatkan tingkat kehidupan yang layak huni.

2. Indikator Kesejahteraan

Konsep perhitungan kesejahteraan yang digunakan hampir di semua negara termasuk Indonesia, merupakan suatu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam konsep ini, kemiskinan dianggap dari

²⁸ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 8.

²⁹ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Amzaah, 2016), 36.

³⁰ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Amzaah, 2016), 36.

³¹ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, 10.

segi ekonomi, yaitu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan.

Peran dan keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kesejahteraan keluarga, khususnya di bidang ekonomi. Banyaknya perempuan yang bekerja di Indonesia dan luar negeri telah meningkatkan prospek pendidikan perempuan, berkontribusi pada keberhasilan program keluarga berencana pemerintah, dan meningkatkan ketersediaan fasilitas penitipan anak, yang memungkinkan perempuan bekerja sambil tetap menjadi ibu rumah tangga. Meningkatnya keinginan perempuan untuk bekerja berdampak tidak hanya pada struktur pasar tenaga kerja, tetapi juga pada ekonomi dan kesejahteraan perempuan dan keluarganya. Semakin banyak penghasilan ibu rumah tangga, semakin baik kesejahteraan keluarganya, kualitas gizinya, dan kesehatannya secara umum.³²

Jika pendapatan pria tidak cukup, atau jika pria tidak bekerja sama sekali, wanita dapat memberikan kontribusi keuangan untuk keluarga. Sedangkan bagi perekonomian nasional, perempuan memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan per kapita dan peningkatan daya beli masyarakat, dan dapat berpartisipasi dalam perbaikan ekonomi makro secara keseluruhan.³³

Kesejahteraan keluarga adalah keadaan keluarga yang dinamis, yang memenuhi semua kebutuhan fisik, materi, mental, emosional dan sosial, keluarga yang hidup secara normal selaras dengan lingkungan, dan anak-anak tumbuh dan berkembang. Perlindungan Sikap dan kepribadian spiritual yang baik, lebih mantap dan matang dari pada personel yang berkualitas. Di sisi lain, keluarga kaya yang didirikan atas dasar perkawinan yang sah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan finansial dari kehidupan yang normal, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan hidup dalam damai. Keluarga yang harmonis dengan keseimbangan hubungan yang sehat antar anggota, serta antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.³⁴

Kedudukan sosial ekonomi keluarga merupakan salah satu indikator kesejahteraan komunal. Status sosial ekonomi keluarga mengacu pada kedudukan masing-masing keluarga dalam masyarakat dalam hal pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan jumlah keluarga yang

³²Mudzhar, HM. Anto, dkk, *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, (Yogyakarta: Sunan KalijagaPress, 2001), 39.

³³ Simanjuntak, P.J., *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, edisi Kedua, (Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), 55.

³⁴Mudzhar, HM. Anto, dkk, *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, 39.

dianggap berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial dan keluarga di sekitarnya.³⁵

Individu dan keluarga mengalami berbagai tingkat kesejahteraan relatif, yang ditentukan oleh filosofi hidup mereka. Keadaan kemakmuran tidak permanen dan dapat berubah dalam kurun waktu tertentu. Dalam memperoleh dan mempertahankan kesejahteraan, seseorang harus terus berusaha dan berkembang tanpa ada batasan waktu.³⁶

Secara umum, definisi sejahtera cukup beragam. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 “keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki hubungan serasi, selaras, dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dengan masyarakat lingkungan”.

D. Ekonomi Keluarga

Ekonomi keluarga adalah konsep dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu ekonomi dan keluarga. Ekonomi adalah kegiatan setiap orang, baik secara individu maupun kolektif, dalam rangka memenuhi keinginan mereka. Sementara keluarga didefinisikan sebagai sekelompok individu yang berbagi hubungan sosial dan biologis melalui pernikahan, kelahiran, atau adopsi, ini tidak mengharuskan mereka untuk tinggal di lokasi yang sama atau berbagi sumber daya.³⁷ Kehidupan rumah tangga dan tanggung jawab untuk anak-anak dan orang tua yang menua. Cara lain memandang ekonomi dan keluarga adalah sebagai berikut:

1. Pengertian ekonomi

Ekonomi atau *economic* dikatakan berasal dari kata Yunani yaitu “*Oikos*” dan “*Oiku*” dan “*Nomos*” yang berarti aturan keluarga dalam banyak literatur ekonomi. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan ekonomi adalah semua yang berhubungan mengenai perilaku rumah tangga yang berkaitan dengan adanya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Kata “rumah tangga” dalam konteks ini mengacu pada rumah tangga yang lebih besar,

³⁵Abdulsyani, *Sosiologi, Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 42.

³⁶Asih Kuswardinah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang Prees, 2007), 53.

³⁷ Simanjuntak, P.J., *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, edisi Kedua, (Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), 55.

tidak hanya di dalam batas-batas keluarga, tetapi juga di tingkat nasional dan global.³⁸

Dari pengertian ilmu ekonomi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan masyarakat, serta pemerintahan yang memajukan kesejahteraan masyarakat, yang terdiri dari keinginan dan aspirasi masyarakat. Ekonomi adalah studi tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa.

2. Pengertian keluarga

Menurut Ulfatmi, keluarga adalah kumpulan individu yang masing-masing memiliki tempat dan fungsi yang berbeda. Sebuah keluarga terbentuk ketika dua individu memutuskan untuk hidup bersama dalam itikad baik dan kesetiaan, dengan tujuan untuk saling melengkapi dan meningkatkan keridhaan Tuhan, berdasarkan keyakinan yang dikuatkan oleh pernikahan dan diikat dengan cinta.³⁹ Menurut Husein, keluarga adalah kehidupan rumah tangga yang didasarkan pada hubungan darah dan perkawinan, serta lokasi di mana anggota jaringan atau area melakukan tugas-tugas instrumental mendasar dan peran ekspresi keluarga.⁴⁰

Adanya keluarga merupakan sarana dalam menjaga kelangsungan hidup tiap anggota untuk dapat memainkan peran yang sama fungsionalnya. Keluarga bertindak sebagai otoritas manajemen seksualitas, reproduksi, sosialisasi, kasih sayang, penentuan status, perlindungan, dan ekonomi. Apabila satu peran tidak dilakukan secara memadai, keluarga menjadi subjek masalah dan tidak berkembang. Kesejahteraan ekonomi didefinisikan dalam penelitian ini, yaitu memiliki sistem kehidupan material dengan rasa aman, moralitas, dan kedamaian batin, dan pada akhirnya masyarakat menjaga mata pencaharian dan memenuhi kebutuhan sosial.

Pengertian lain dari ekonomi keluarga yaitu kegiatan pemenuhan hidup suatu keluarga melalui aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh anggota keluarganya dalam pembahasan ini mengerucut kepada istri, supaya dapat mencapai pemenuhan untuk kebutuhan primer ataupun

³⁸ Iskandar Putong, *Economics Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 1.

³⁹ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 19.

⁴⁰ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), 121.

sekunder demi kelangsungan hidup sehari-hari.⁴¹ Dengan demikian, ekonomi keluarga dicapai melalui kegiatan yang bisa dilaksanakan bersama dengan upaya untuk memastikan kesejahteraan keluarga.

Perekonomian adalah suatu upaya untuk keluar dari kemiskinan untuk memperoleh ekonomi yang lebih baik. Hal tersebut dapat membuat seseorang dapat hidup damai dan sejahtera. Oleh karena itu, mereka yang menjalani kehidupan yang damai akan membawa hal-hal yang baik dalam hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Maka, sangat jelas bahwa ekonomi keluarga itu sendiri dan lingkungan sekitar akan sangat terpengaruh, dimulai dari ekonomi keluarga masyarakat serta kehidupan.⁴²

E. Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Dalam bahasa Arab, istilah "ekonomi" disebut sebagai "*iqtisad*", yang berasal dari akar kata *Qasd*, yang berarti "sederhana, hemat, sedang, lurus, dan tengah". Sedangkan istilah "*iqtisad*" memiliki konotasi yang lugas tentang hemat dan kejujuran. Ungkapan ini kemudian terkenal digunakan dalam bahasa Indonesia sebagai istilah ekonomi. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kesulitan ekonomi masyarakat melalui lensa keyakinan Islam.⁴³ Menurut para ahli, ekonomi syariah didefinisikan sebagai berikut:

Menurut Monzer Kahfi dalam bukunya *The Islamic Economy*, ekonomi Islam merupakan cabang ilmu ekonomi yang interdisipliner dalam arti tidak dapat dipelajari secara tersendiri, tetapi memerlukan pemahaman yang mendalam tentang ilmu-ilmu pendukung serta ilmu-ilmu yang menjadi alat analisis, seperti matematika, statistika, logika, dan ushulfiqh.⁴⁴

Ekonomi Islam, sebagaimana didefinisikan oleh MA Mannan, adalah ilmu sosial yang mengkaji masalah ekonomi masyarakat melalui lensa cita-cita Islam.⁴⁵

⁴¹Doriza, Shinta, *Ekonomi Keluarga* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2015), 3.

⁴²Doriza, Shinta, *Ekonomi Keluarga*, 4.

⁴³Juhaya S Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 56.

⁴⁴Al Arif dkk, *Teori Mikrobiologi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: GramataPublishing, 2010), 7.

⁴⁵M.A.Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek* (Jakarta: Intermassa, 1992), 15.

Menurut Umar Chapra, ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membantu manusia dalam mencapai kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya yang langka sesuai dengan tujuan syariah (al-iqtisadal-syariah) tanpa terlalu membatasi kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan ekonomi makro, merusak lingkungan, atau merusak keluarga dan solidaritas sosial dan moral yang ada dalam masyarakat.⁴⁶

Definisi para ahli syariah menekankan sifat subjek yang lengkap dan didasarkan pada norma-norma moral ekonomi syariah, yang mengkaji kesejahteraan manusia sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya alam yang kooperatif dan partisipatif.⁴⁷

2. Konsep Dasar Ekonomi Syariah

Kehidupan seorang muslim di tingkat individu dan masyarakat diatur oleh seperangkat aturan yang berbeda. Pertama, yang dikenal sebagai aqidah (iman), menyangkut hubungan inti antara manusia dan sang pencipta dan kesepakatan dengan iman dan keyakinan seorang muslim. Kedua, mengatur kesepakatan dengan mengubah dan mewujudkan iman dan keyakinan menjadi tindakan dan praktik sehari-hari dan secara formal dikenal sebagai syariah (hukum). Ketiga, adalah akhlak yang meliputi perilaku, sikap, dan etika kerja yang dianut oleh seorang muslim dalam hidup bermasyarakat syariah lebih lanjut dibagi menjadi dua komponen:

- a. Ibadah (ritual) berfokus pada ritus dan ritual melalui mana setiap individu datang ke batin pemahaman tentang hubungan mereka dengan Allah SWT.
- b. Muamalat, pada sisi lain mendefinisikan aturan yang mengatur sosial, politik, dan ekonomi kehidupan. Memang bagian yang signifikan dari muamalat mendefinisikan perilaku kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi, yang pada akhirnya meletakkan menurunkan aturan untuk sistem komersial, keuangan dan perbankan.

Selain itu, basis ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material fisik orang, masyarakat, dan negara. Tetapi juga tumbuhnya elemen-elemen lain yang berkontribusi pada keberadaan yang lebih tenang dan sejahtera. Kepercayaan adalah landasan dari setiap aktivitas individu dan komunal. Ketika keyakinan itu teguh dan nyata, dan Islam dianggap kaffah, maka

⁴⁶ChapraUmer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi(Sebuah Tinjauan Islam)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 338.

⁴⁷Juhaya S Praja, *Ekonomi Syariah*, 57.

muamalah secara alami juga akan menjadi baik.⁴⁸ Menurut Karim, ekonomi syariah diibaratkan seperti sebuah bangunan yang didasarkan pada lima nilai universal yaitu Tauhid (penghambaan total kepada Alaj), Al Adl (keadilan), Nubuwwah (meneladani sunnah Nabi Muhammad SAW), Khilafah (manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi), dan Ma'ad (berorientasi keakhiratan). Dengan nilai-nilai ini diharapkan para pelaku ekonomi syariah mampu menerapkannya menjadi sistem-sistem kongkrit yang tidak hanya berada di tataran akademik belaka.⁴⁹

3. Unsur-unsur Pokok Ekonomi Syariah

Setelah pembahasan konsep-konsep fundamental di atas, berikut adalah ringkasan komponen utama ekonomi Islam:

- a. Unsur spiritualitas, moralitas dan etika.
- b. Unsur pengelolaan yang efektif dan efisien.
- c. Unsur pengetahuan dan keahlian.
- d. Unsur kerja atau usaha
- e. Unsur perdagangan dan produksi barang dan jasa
- f. Unsur keuntungan pengganti riba
- g. Unsur larangan: produksi barang jasa yang haram, riba, judi atau maysir, dan gharar
- h. unsur modal dan menjauhi utang
- i. unsur kerjasama dan *risksharing*
- j. unsur amanah: kesucian kontrak dan menepati janji.

4. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip merupakan pernyataan dasar atau kebenaran universal atau pribadi yang digunakan sebagai pedoman berpikir atau berperilaku oleh individu atau organisasi.⁵⁰ Prinsip adalah semangat penuntun kemajuan atau perubahan; itu adalah hasil dari akumulasi pengalaman dan makna dari item tertentu. Ekonomi Islam harus berpegang pada prinsip-prinsip berikut dalam pelaksanaannya:

- a. Allah SWT menganugerahkan sumber daya kepada umat manusia sebagai hadiah atau titipan. Dengan demikian, orang tidak boleh berubah-ubah dengan sumber daya yang tersedia.
- b. Islam menerima kepemilikan individu dalam parameter tertentu, dan karenanya tidak perlu dimiliki sendiri.

⁴⁸ Ahmad Mundir, *Perbandingan Sistem Ekonomi*, (Surabaya: Kopertais IV Press, 2015),

⁴⁹ A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT, 2002), 3

⁵⁰ Muhammad Masrus, *Peranan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Revolusi Mental*, (Pekalongan: IAIN Pekalongan Press, 2016), 434.

- c. Kerjasama adalah faktor pendorong utama ekonomi Islam. Mereka juga merupakan prinsip dasar Ekonomi Syariah, karena didasarkan pada konsep berjamaah, gotong royong, dan gotong royong.
- d. Ekonomi Islam memastikan kepemilikan publik dan penerapannya dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi sejumlah besar orang.
- e. Seorang Muslim harus takut kepada Allah Azza Wa Jalla dan Hari Pembalasan di akhirat, sehingga penilaian yang dibuat dalam ekonomi syariah tidak hanya didasarkan pada keuntungan duniawi. Zakat harus dibayarkan atas harta yang melebihi batas (nishab), artinya tidak semua muslim diwajibkan membayar zakat, tetapi mereka yang memiliki harta tertentu wajib membayarnya.
- f. Islam melarang riba dalam segala manifestasinya, dan ada beberapa jenis riba yang harus kita hindari saat ini.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul dan Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan
Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan), (Siti Hasanah, 2013). ⁵¹	Pemberdayaan perempuan dalam bidang simpan pinjam memiliki potensi untuk mengatasi kemiskinan yang dihadapi kaum perempuan dan keluarganya dalam rangka meningkatkan penghasilan perempuan dengan melakukan pemberdayaan dalam bidang ekonomi.	Penelitian yang dilakukan yaitu mengelola simpan pinjam dengan menerapkan sistem yang bebas bunga. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas pengelolaan simpan pinjam yang terdapat bunga pada pinjamannya.
Pemberdayaan Perempuan dalam	Pemberdayaan perempuan melalui	Subjek Penelitian yang dilakukan

⁵¹ Siti Hasanah, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan)", *Jurnal SAWWA*, 1, No.9, 2013.

<p>Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam. (Anifatus Solihah, 2016)⁵²</p>	<p>Home Industry Bulu Mata di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas telah ikut andil bagian dalam menambah pendapatan keluarga dan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Islam. Dimana pendapatan yang dihasilkan digunakan untuk kebutuhan keluarga antarlain untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, sekolah, dan juga kebutuhan sifat sosial lainnya.</p>	<p>yaitu pemberdayaan perempuan melalui home industry, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas pemberdayaan melalui kegiatan SPP.</p>
<p>Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Perempuan di Desa Sindangkempeng Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon), (Wahyu</p>	<p>Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) dalam melakukan pemberdayaan perempuan melalui pendekatan penguatan secara umum sudah dilakukan dengan baik seperti membuka akses keuangan, memberikan pelatihan serta pendampingan.</p>	<p>Pada penelitian tersebut pemberdayaan yang dilakukan dengan menekankan pada kegiatan organisasi perempuannya, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan terfokus pada kegiatan simpan</p>

⁵² Anifatus Solihah, Pemberdayaan Perempuan dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam, (Skripsi IAIN Purwokerto ,2016).

Tjiptaningsih, 2017. ⁵³	Penguatan mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri perempuan di Desa Sindangkempeng yang menunjang kemandirian mereka guna memperkuat kapasitas kaum perempuan (capacity building) untuk membantu pendapatan ekonomi keluarga.	pinjam.
Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Ibu Inspirasi “KOPERNIK” Dalam Mengentaskan Kemiskinan, (Agus Setiaman, Utami Chairany, dan Kismiyati El Karimah, 2018) ⁵⁴	KOPERNIK memberdayakan ibu-ibu di wilayah terpencil dengan memberikan pelatihan tentang manfaat, penggunaan dan perawatan teknologi, penjualan dan pemasaran, pembukuan, dan manajemen keuangan. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda; ibu rumah tangga, aktivis lingkungan, petani, dll. Maka dari itu sesi pelatihan tersebut diharapkan dapat	Penelitian yang dilakukan yaitu pemberdayaan perempuan berfokus pada keterampilan hingga para perempuan bisa membantu keluarga secara finansial. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu berfokus pada kegiatan simpan pinjam untuk biaya permodalan.

⁵³ Wahyu Tjiptaningsih, “Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Perempuan di Desa Sindangkempeng Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon)”, *Jurnal Ilmiah Administrasi*, 2, No.1, 2017

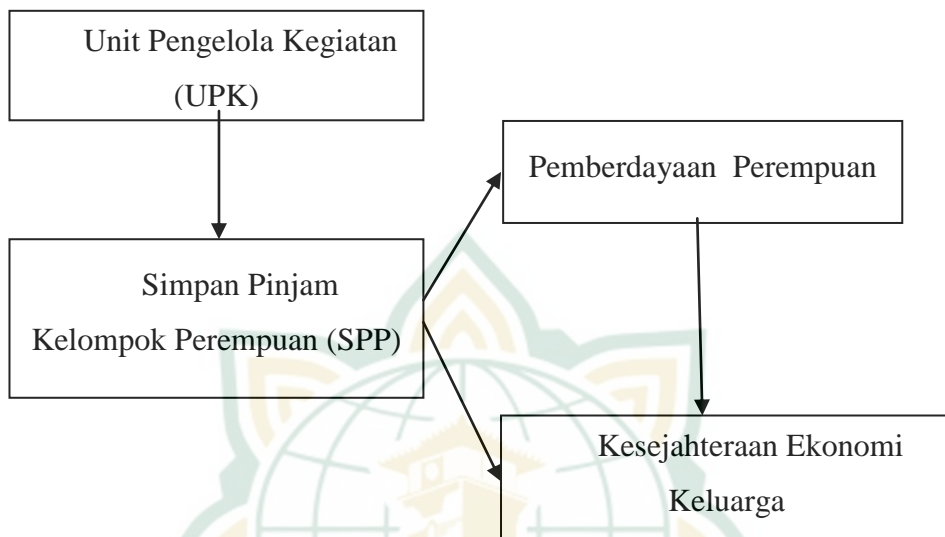
⁵⁴ Agus Setiaman, Utami Chairany, dan Kismiyati El Karimah, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Ibu Inspirasi “KOPERNIK” Dalam Mengentaskan Kemiskinan”, *Jurnal Common*, 2, No.2, 2018.

	membangun ketrampilan dan rasa percaya diri untuk bisa berhasil menjadi agen perubahan di wilayahnya masing-masing, terlepas dari pekerjaan yang sedang dijalaninya.	
Pemberdayaan Perempuan/Ibu Rumah Tangga Melalui Kegiatan Simpan Pinjam Di Koperasi Sumber Rezeki Baru RW 08 Penjaringan Jakarta Utara, (Nur Syaidah, 2020) ⁵⁵	Penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi dapat memberdayakan anggotanya melalui kegiatan simpan pinjam, dimana anggota dapat meminjam modal untuk membuat usaha dan meningkatkan pendapatan taraf ekonomi keluarga. Dengan melakukan 6 tahapan yaitu tahapan persiapan, pengkajian, perencanaan alternatif, evaluasi, dan terminasi.	Objek penelitian yang dilakukan yaitu terdapat di Koperasi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu terdapat di UPK. Penelitian ini membahas ke arah umum sedangkan peneliti membahas dalam perspektif syariah.

G. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah representasi konseptual dari gagasan tentang banyak komponen dan hubungan timbal baliknya, yang telah diakui sebagai perhatian kritis. Penulis menyusun kerangka berpikir dalam skripsi ini dengan cara sebagai berikut:

⁵⁵ Nur Syaidah, "Pemberdayaan Perempuan/Ibu Rumah Tangga Melalui Kegiatan Simpan Pinjam Di Koperasi Sumber Rezeki Baru RW 08 Penjaringan Jakarta Utara", (*Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2020).



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

UPK adalah lembaga yang bergerak dibidang keuangan yang menyelenggarakan program simpan pinjam untuk kelompok perempuan yang mempunyai usaha dan memiliki motivasi untuk mengembangkan usahanya. Dengan melihat kerangka pikir diatas, dimana UPK Kecamatan Mayong ini berperan sebagai input, dan sedangkan program SPP disini sebagai proses dari hasil yang akan diteliti dari output untuk keberdayaan ekonomi masyarakatnya yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan program SPP.